

Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi

Fandina Aulia Wulandari¹, Kholida Atiyatul Maula²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur pembentukan gaji PNS dan PPNP, sistem akuntansi penggajian PNS dan PPNP kemudian efektivitas pengendalian internal sistem akuntansi penggajian yang diterapkan oleh BPS Kabupaten Bekasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data primer diawali dengan melakukan wawancara kepada bagian penggajian dan menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan gaji pegawai.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa unsur-unsur pembentukan gaji pada BPS Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, kemudian sistem akuntansi penggajian PNS sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk penggajian PPNP sudah cukup baik hanya saja terdapat perbedaan dengan peraturan yang berlaku dan untuk pengendalian internal pegawai BPS Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan pengendalian internal menurut COSO.

Kata kunci : *Unsur-unsur Pembentukan Gaji; Sistem Akuntansi Penggajian; PNS; PPNP dan Efektifitas Pengendalian Internal.*

Copyright (c) 2022 Fandina aulia wulandari

✉ Corresponding author :

Email Address : fandinaauliaw@gmail.com , kholida.maula@fe.unsika.ac.id

PENDAHULUAN

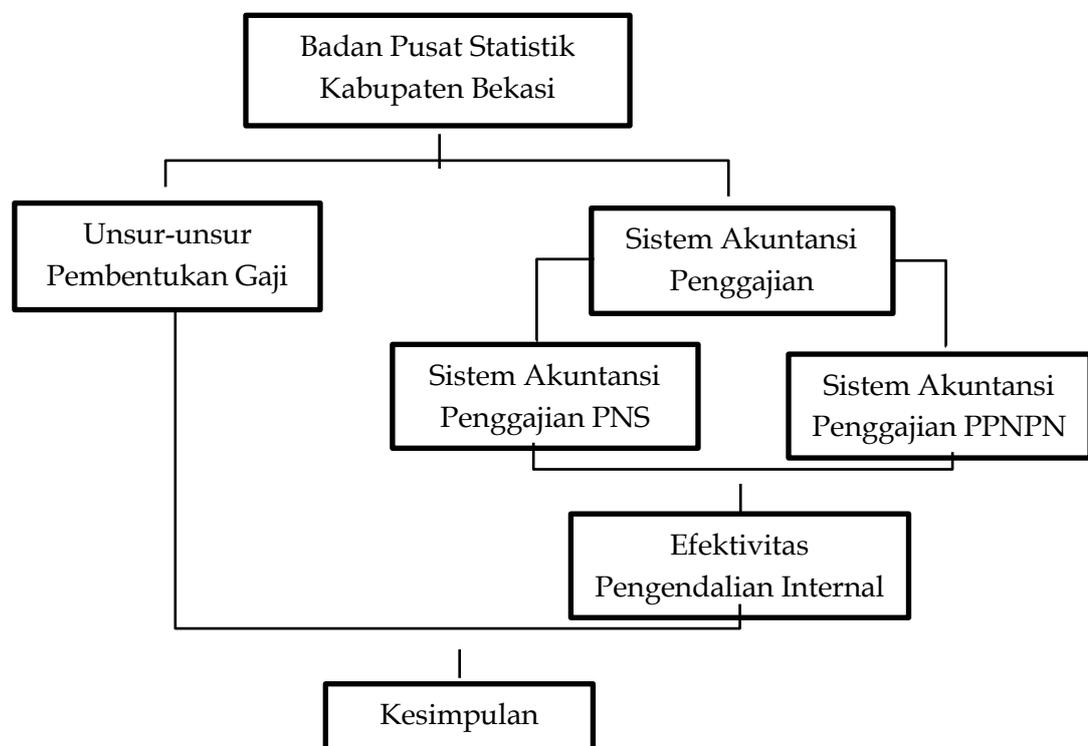
Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat dari waktu ke waktu. Keadaan tersebut dapat membuat suatu instansi pemerintahan berkembang menjadi lebih baik dan menjadi lebih maju. Pada umumnya setiap perusahaan menginginkan tercapainya visi dan misi dari masing-masing perusahaan. Untuk mendukung pernyataan tersebut, dibutuhkan SDM atau pegawai yang berkualitas dalam perusahaan/instansi.

pegawai memiliki tugas dalam melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan jabatan dari masing-masing pegawai. Untuk semua pekerjaan yang sudah dilakukan oleh setiap pegawai, perusahaan wajib untuk memberikan suatu imbalan yang berupa gaji. Besarnya gaji pegawai tergantung dari posisi dan jabatan dari masing-masing pegawai.

Sistem akuntansi penggajian suatu sistem yang dirancang oleh instansi pemerintah untuk memantau dan mengawasi jalannya suatu proses transaksi, mempunyai sistem akuntansi penggajian yang baik akan menghasilkan data mengenai informasi akuntansi yang jelas dan akurat untuk dapat memudahkan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan. tidak menerapkan sistem akuntansi penggajian yang baik dapat memungkinkan terjadinya kesalahan baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Dalam mencegah hal tersebut, maka suatu instansi perlu menerapkan sistem penggajian yang baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penggajian BPS Kabupaten Bekasi memiliki 2 jenis penggajian yaitu penggajian untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Penggajian untuk PPNNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Perhitungan gaji tersebut sudah menggunakan aplikasi dalam menghitung gaji pegawai. tetapi apakah sistem akuntansi penggajian yang diterapkan oleh BPS Kabupaten Bekasi sudah efektif atau tidak efektif dalam memberikan suatu dampak yang baik bagi BPS Kabupaten Bekasi. karena menurut Handayani, 2020 gaji merupakan hal yang sangat penting maka dibutuhkan ketelitian untuk menghindari adanya kesalahan dan kecurangan atau penyalahgunaan dokumen yang berkaitan dengan penggajian. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jenis penggajian dan melihat tingkat keefektifan maka dibutuhkan analisis mengenai Sistem Akuntansi Penggajian pada BPS Kabupaten Bekasi.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Dari kerangka berpikir diatas, dalam penelitian ini penulis menganalisis unsur-unsur pembentukan gaji dan sistem akuntansi penggajian pada BPS Kabupaten Bekasi dengan menggunakan data kuantitatif untuk menganalisis. Dalam penggajian pegawai BPS Kabupaten Bekasi terdapat 2 jenis penggajian yaitu penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Neger. dari 2 jenis penggajian tersebut, apakah BPS Kabupaten Bekasi sudah menerapkan pengendalian internal yang efektif dalam sistem akuntansi penggajian. karena menurut Aisyah, 2019 memiliki sistem akuntansi penggajian yang baik dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat serta dapat tercapainya efektifitas dan efisiensi. Dari hasil analisis penulis dan perbandingan dengan teori-teori yang ada dapat menarik suatu kesimpulan pada penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif yaitu metode untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan secara objektif dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data dan penampilan data.

Menurut Wahyuni, 2018 Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu objek penelitian melalui data-data yang telah terkumpul dengan menjelaskan secara detail sehingga memudahkan untuk dipahami dan disimpulkan. sedangkan metode kuantitatif menurut Sugiyono, 2013 adalah suatu penelitian pada sampel tertentu dengan analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik untuk menguji keadaan data yang diteliti. metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara jelas mengenai objek yang diteliti melalui data kuantitatif yang telah penulis kumpulkan, kemudian data tersebut diolah kemudian dianalisis dengan teori-teori yang dianggap relevan sehingga proses penelitian dapat menarik suatu kesimpulan atau hasil dari analisis sistem akuntansi penggajian pada BPS Kabupaten Bekasi.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang mana terdapat data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum perusahaan

Badan Pusat Statistik merupakan lembaga Pemerintah Non-Departemen yang mempunyai fungsi pokok yaitu melakukan pembina dan penyedia data-data informasi statistik yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat umum. Nama Badan Pusat Statistik sebelumnya adalah Biro Pusat Statistik. BPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjalankan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan PP No. 86 Tahun 2007 tentang BPS dan Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS. Pegawai di BPS Kabupaten Bekasi yaitu 40 orang. Untuk PNS berjumlah 35 orang dan untuk PPNPN sebanyak 5 orang.

Pegawai berdasarkan tingkat golongan jabatan

No	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
2.	Pembina (IV/a)	4
3.	Penata Tingkat I (III/b)	5
4.	Penata (III/c)	7
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	10
6.	Penata Muda (III/a)	3
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
8.	Pengatur Muda (II/b)	1
Total		35

Sumber: data diolah 2022

Data PPNPN beserta jabatan pada BPS Kabupaten Bekasi

Jabatan	Jumlah Orang
Tenaga Kontrak SATPAM	3 Orang
Tenaga Kontrak Pramubhakti (OB)	2 Orang
Total	5 Orang

Sumber: data diolah 2022

Tugas BPS yaitu menerbitkan data publikasi statistik nasional maupun daerah, melaksanakan pengumpulan data-data dan melakukan analisis mengenai data statistik untuk pengambilan kebijakan pemerintah, serta menyusun dan merumuskan kebijakan dibidang statsitik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun hasil penelitian dan pembahasan pada BPS Kabupaten Bekasi yang dilakukan penulis dengan membandingkan hasil penelitian dan peraturan yang ditetapkan yaitu :

Unsur-unsur pembentukan gaji PNS dan PPNPN pada BPS Kabupaten Bekasi

A. Unsur-unsur Pembentukan Gaji PNS :

1. Gaji pokok pada BPS Kabupaten Bekasi berdasarkan pangkat golongan yang disesuaikan dengan PPRI No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS.

Gaji pokok PNS di BPS Kabupaten Bekasi tahun 2021

No.	Golongan PNS	Besar gaji
1.	Golongan I	Rp. 1.560.800 – Rp. 2.686.500
2.	Golongan II	Rp. 2.022.200 – Rp. 3.820.000
3.	Golongan III	Rp. 2.579.400 – Rp. 4.797.000
4.	Golongan iv	Rp. 3.044.300 – Rp. 5.901.200

Sumber: data diolah 2022

2. Tunjangan-tunjangan

Tunjangan yang didapat pegawai BPS Kabupaten Bekasi berupa :

a. Tunjangan istri/suami

Pada BPS Kabupaten Bekasi tunjangan ini diberikan kepada PNS sebesar 10% dari gaji pokok. Tunjangan istri/suami pada BPS Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

b. Tunjangan Anak

Tunjangan ini merupakan tunjangan yang didapat PNS yang memiliki anak kandung, anak tiri atau anak angkat. Menurut revisi Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negeri No. 19/SE/80 yaitu batas usia anak pada tunjangan ini sampai 25 tahun, apabila anak tersebut masih melanjutkan pendidikan maka anak tersebut masih mendapatkan tunjangan. BPS Kabupaten Bekasi telah menerapkan tunjangan anak untuk tiap anak dari gaji pokok PNS sebesar 2%.

c. Tunjangan Jabatan

Tunjangan ini dibagi menjadi tunjangan jabatan struktural dan fungsional. Tunjangan jabatan struktural yaitu tunjangan yang didapat PNS yang menjabat sebagai jabatan struktural. Sedangkan tunjangan jabatan fungsional adalah tunjangan yang didapat oleh PNS yang menjabat sebagai jabatan fungsional. Pada BPS Kabupaten Bekasi tunjangan struktural dan fungsional diberikan kepada :

Hasil Tunjangan Struktural dan Fungsional BPS Kabupaten Bekasi tahun 2021

No	Jabatan	Tunjangan Struktural	Tunjangan Fungsional
1.	Kepala BPS Kabupaten Bekasi	Rp. 1.260.000	-
2.	Koordinator Fungsi dan Kepala subbagian umum	Rp. 540.000	-
3.	Statistisi Muda	-	Rp. 960.000
4.	Statistisi Penyelia	-	Rp. 750.000
5.	Statistisi Pelaksana	-	Rp. 540.000
6.	Statistisi Pelaksana Lanjutan	-	Rp. 450.000

Sumber: data diolah 2022

Tunjangan-tunjangan tersebut sudah sesuai dengan PP No. 26 tahun 2007 tentang tunjangan struktural dan PP No. 110 tahun 2016 tentang tunjangan fungsional.

d. Tunjangan Beras

Tunjangan beras adalah tunjangan pangan yang berupa beras yang didapat PNS sebesar 10 kg per orangnya yang diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 7.242 per kilogram. Jadi tunjangan beras perbulannya yang diterima PNS dalam bentuk uang sebesar Rp. 72.420. Tunjangan beras pada BPS Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan peraturan No. 67 tahun 2020 tentang tunjangan beras dalam bentuk natura dan uang.

e. Tunjangan Umum

PNS di BPS Kabupaten Bekasi yang tidak mendapatkan tunjangan jabatan struktural dan fungsional akan diberikan tunjangan umum agar dapat meningkatkan semangat kerja dan meningkatkan prestasi. Tunjangan umum yang didapat PNS pada BPS Kabupaten Bekasi :

Hasil Tunjangan Umum BPS Kabupaten Bekasi tahun 2021

Golongan	Besar Tunjangan Umum	Jumlah orang
Golongan I	Rp. 175.000	0
Golongan II	Rp. 180.000	3 Orang
Golongan III	Rp. 185.000	8 Orang
Golongan IV	Rp. 190.000	1 Orang

Sumber: data diolah 2022

f. Pembulatan

Berdasarkan surat edaran Dirjen Anggaran No. SE-2/A/522/0193 tentang pembayaran gaji pokok PNS. Unsur perhitungan penghasilan bruto salah satunya adalah angka pembulatan. Dalam daftar gaji PNS pembulatan gaji bersih dilakukan untuk mempermudah bendahara pengeluaran dalam proses penyelesaian pembayaran gaji PNS.

g. Tunjangan Pajak Penghasilan

Yang dimaksud tunjangan ini adalah tunjangan yang diberikan oleh negara tetapi tunjangan tersebut dimasukkan dalam potongan PPh pasal 21 untuk itu PPh tersebut tidak mempengaruhi besarnya gaji PNS yang didapat.

- Potongan-potongan yang dikenakan PNS di BPS Kabupaten Bekasi yaitu IWP berupa Iuran dana pensiun dan Iuran pemeliharaan kesehatan (BPJS), tabungan perumahan dan pajak penghasilan Pasal 21.

4. Tambahan Penghasilan PNS pada BPS Kabupaten Bekasi :
- a. Uang Makan pada BPS Kabupaten Bekasi ditentukan berdasarkan absensi dari masing-masing pegawai. jika pegawai tidak absen maka tidak mendapatkan uang makan. Perhitungan uang makan sudah menggunakan aplikasi dan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Uang makan PNS pada BPS Kabupaten Bekasi tahun 2021

No	Pangkat golongan	Sebesar
1.	Golongan I dan II	RP. 35.000
2.	Golongan III	Rp. 37.000
3.	Golongan IV	Rp. 41.000

- b. Tunjangan Khusus/Kinerja (TK) yang diterapkan BPS Kabupaten Bekasi perhitungannya menggunakan aplikasi khusus BPS yaitu TK online. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan capaian kinerja pegawai, tingkat kehadiran menurut hari dan dan jam kerja. Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bekasi tahun 2021 sesuai dengan PPRI No. 99 tahun 2018 yaitu :

No	Kelas Jabatan	TK Per Kelas jabatan	Jumlah pegawai
1.	17	Rp. 33.240.000	0
2.	16	Rp. 27.577.500	0
3.	15	Rp. 19.280.000	0
4.	14	Rp. 17.064.000	0
5.	13	Rp. 10.936.000	0
6.	12	Rp. 9.896.000	1 Orang
7.	11	Rp. 8.757.600	0
8.	10	Rp. 5.979.200	0
9.	9	Rp. 5.079.200	8 Orang
10.	8	Rp. 4.595.150	9 Orang
11.	7	Rp. 3.915.950	13 Orang
12.	6	Rp. 3.510.400	3 Orang
13.	5	Rp. 3.134.250	1 Orang
14.	4	Rp. 2.985.000	0
15.	3	Rp. 2.898.000	0
16.	2	Rp. 2.708.250	0
17.	1	Rp. 2.531.250	0
Jumlah			35

Untuk potongan hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan Kepala BPS No. 77 tahun 2012 tentang teknis pelaksanaan pemberian TK pegawai di lingkungan BPS yaitu :

Keterlambatan (TL)	Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lamanaya Keterlambatan	Presentase Potongan
TL. 1	PSW 1	≤ 30 menit	0,5%
TL. 2	PSW 2	> 30 menit s.d ≤ 60 menit	1%
TL. 3	PSW 3	> 60 menit s.d ≤ 90 menit	1,25%
TL. 4	PSW 4	> 90 menit atau tidak melakukan absensi	1,5%

Unsur-unsur pembentukan gaji PNS di BPS Kabupaten Bekasi sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Dibawah ini Keterangan penghasilan PNS pada BPS Kabupaten Bekasi :

Rincian Gaji Terakhir

– Gaji Pokok	RP. xxxx
– Tunjangan Istri/Suami	Rp. xxxx
– Tunjangan Anak	Rp. xxxx
– Tunjangan Jabatan	Rp. xxxx
– Tunjangan Beras	Rp. xxxx
– Tunjangan Umum	Rp. xxxx
– Pembulatan	Rp. xxxx
– Tunjangan Khusus Pajak	Rp. xxxx
Jumlah Penerimaan Kotor	Rp. xxxx

Potongan-potongan :

– Iuran Wajib Pegawai	Rp. xxxx
– BPJS	Rp. xxxx
– Tabungan Perumahan	Rp. xxxx
– Potongan Pajak Penghasilan	Rp. xxxx

Jumlah Potongan	<u>Rp.xxxx</u>
Gaji Bersih	Rp. xxxxx

Tambahan Penghasilan

– Uang Makan	Rp. xxx
– Tunjangan Khusus/Kinerja	Rp. xxx

Jumlah tambahan penghasilan	<u>Rp. xxx</u>
Jumlah Penghasilan yang diterima	Rp. xxxx

B. Unsur-unsur Pembentukan Gaji PPNPN :

1. Gaji Pokok PPNPN tahun 2021 pada BPS Kabupaten Bekasi gaji pokok PPNPN sesuai dengan kontrak yang ditentukan oleh BPS Kabupaten Bekasi yaitu untuk gaji tenaga kontrak satpam sebesar Rp. 3.777.000 sedangkan untuk tenaga kontrak Pramubakti (OB) sebesar Rp. 3.433.000.
2. Potongan yang dikenakan setiap PPNPN pada BPS Kabupaten Bekasi
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Potongan ini tidak dikenakan pada PPNPN di BPS Kabupaten Bekasi dikarenakan penghasilan PPNPN dibawah dari PTKP. PPh pasal 21 di BPS Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

b. Iuran Jamkes

Potongan ini pada BPS Kabupaten Bekasi sebesar 2% dari penghasilan PPNPN sesuai dengan peraturan yang berlaku di BPS Kabupaten Bekasi.

Unsur-unsur pembentukan gaji PPNPN pada BPS Kabupaten Bekasi sudah baik dan sesuai dengan kontrak dan peraturan yang ditetapkan.

Sistem Akuntansi Penggajian PNS pada BPS Kabupaten Bekasi

1. Fungsi yang terakit dalam Sistem Akuntansi Penggajia PNS yaitu Fungsi kepegawaian, Fungsi Pencatatan Waktu, Fungsi Pembuatan Daftar Gaji, Fungsi Akuntansi dan Fungsi Keuangan.

Pada BPS Kabupaten Bekasi fungsi terkait sistem akuntansi penggajian PNS sudah sesuai dengan Mulyadi, 2016.

2. Dokumen yang digunakan dalam Penggajian PNS yaitu Dokumen pendukung perubahan gaji, Daftar Hadir PNS, Daftar Gaji PNS, Rekap Daftar Gaji, Surat Pernyataan Gaji, Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Bukti Kas Keluar berupa Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D).

Dalam dokumen yang digunakan BPS Kabupaten Bekasi kurang sesuai dengan Mulyadi, 2016 dikarenakan kartu jam hadir dan kartu jam kerja PNS sudah digantikan dengan menggunakan aplikasi kaizala yang dapat memudahkan dalam menghitung kekurangan jam kerja PNS, kemudian amplop gaji tidak digunakan kerana pembayaran gaji PNS dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening masing-masing PNS. Perubahan tersebut jauh lebih efektif untuk BPS Kabupaten Bekasi.

3. Prosedur yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian PNS yaitu Prosedur Pencatatan Waktu Hadir PNS, Prosedur Pembuatan Daftar Gaji, Prosedur Distribusi biaya gaji, Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar berupa Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) dan Proses Pembayaran Gaji PNS.

BPS Kabupaten Bekasi menggunakan prosedur sistem akuntansi penggajian sesuai dengan Mulyadi, 2016.

Sistem Akuntansi Penggajian PPNPN pada BPS Kabupaten Bekasi :

1. Fungsi yang terkait dalam Sistem Akuntansi Penggajian PPNPN yaitu Fungsi Kepegawaian, Fungsi Pencatatan Waktu, Fungsi Pembuatan Daftar Gaji, Fungsi Akuntansi dan Fungsi Keuangan.

Pada BPS Kabupaten Bekasi fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian PPNPN sudah sesuai dengan Mulyadi, 2016.

2. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian PNS yaitu Dokumen Perubahan Gaji, Daftar Hadir PPNPN, Daftar Gaji PPNPN dan Rekapannya, Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bukti Kas Keluar berupa Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D).

Dokumen yang digunakan BPS Kabupaten Bekasi kurang sesuai dengan Mulyadi, 2016 karena kartu jam hadir dan kartu jam kerja PPNPN sudah diganti dengan mesin Handkey. kemudian amplop gaji tidak digunakan kerana pembayaran gaji PPNPN dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening PPNPN. Perubahan tersebut jauh lebih efektif untuk BPS Kabupaten Bekasi karena dapat mempercepat dan tidak memakan banyak waktu serta tenaga.

3. Prosedur yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian PPNPN yaitu Prosedur Pencatatan Waktu Hadir PPNPN, Prosedur Pembuatan Daftar Gaji PPNPN, Prosedur Bukti Kas Keluar PPNPN dan Prosedur Pembuatan Gaji PPNPN.

Dalam prosedur yang digunakan BPS Kabupaten Bekasi dalam sistem akuntansi penggajian PPNPN sudah sesuai dengan Mulyadi, 2016.

Efektivitas Pengendalian Internal sistem akuntansi penggajian

Komponen pengendalian internal pada BPS Kabupaten Bekasi yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian pada BPS Kabupaten Bekasi sudah menggunakan SOP yang mengacu pada peraturan BPS yang ditetapkan.
2. Aktivitas Pengendalian pada BPS Kabupaten Bekasi dalam setiap transaksi dan kegiatan oleh KPPN, Kepala BPS, Kasubbag umum, PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran. Serta dalam pemeriksaan kinerja pegawai selalu mengadakan briefing.
3. Penilaian Risiko, pada BPS Kabupaten Bekasi upaya yang dilakukan untuk penilaian risiko yaitu melakukan pengawasan, perencanaan, kemudian pengecekan dan melakukan penilaian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur-unsur pembentukan gaji PNS dan PPNPN yang diterapkan BPS Kabupaten Bekasi
 - A. Unsur-unsur pembentukan gaji PNS terdiri dari :
 - a) Gaji Pokok
 - b) Tunjangan-tunjangan
 - c) Potongan-potongan
 - d) Tambahan Penghasilan
 - B. Unsur-unsur pembentukan gaji PPNPN terdiri dari :
 - a) Gaji Pokok PPNPN
 - b) Potongan-potongan
2. Sistem akuntansi penggajian PNS yang diterapkan di BPS Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan UU/PMK/Peraturan yang berlaku tetapi kurang sesuai dengan Mulyadi, 2016 dan Agatha 2018 dikarenakan dokumen yang digunakan dalam penggajian PNS pada BPS Kabupaten Bekasi sudah mengganti kartu jam hadir dan jam kerja dengan aplikasi kaizala yang dapat memudahkan fungsi pencatat waktu dalam menghitung kekurangan jam kerja dari setiap PNS, kemudian pada BPS Kabupaten Bekasi amplop gaji PNS sudah diganti dengan mentransfer langsung gaji PNS ke rekening masing-masing PNS.
3. Sistem akuntansi penggajian PPNPN yang diterapkan di BPS Kabupaten Bekasi kurang sesuai dengan UU/PMK/Peraturan yang berlaku dikarenakan ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada kemudian pada dokumen yang digunakan BPS Kabupaten Bekasi terdapat perubahan dengan Mulyadi, 2016 dan Agatha 2018 yaitu pada kartu jam hadir dan jam kerja PPNPN sudah digantikan dengan Mesin Handkey untuk absensi yang digunakan PPNPN dan amplop gaji sudah tidak digunakan karena dalam pembayaran gaji PPNPN dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening masing-masing PPNPN. Perubahan tersebut membuat BPS Kabupaten Bekasi jauh lebih efektif.

4. Tingkat efektivitas pengendalian internal pada sistem akuntansi penggajian pegawai yang diterapkan BPS Kabupaten Bekasi sesuai dengan COSO, 2015 terbukti dengan adanya Lingkungan pengendalian, Akitivitas pengendalian, Penilaian risiko, Informasi dan komunikasi, serta Kegiatan pemantauan pengendalian internal. Tetapi terdapat perangkapan tugas yang menyebabkan kurang efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pada bagiannya sendiri.

Referensi :

- Afansyah, Praptiningsih, Setiawan. (2021). Efektivitas Pengendalian Internal Sistem Penggajian pada BPS Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 2.
- Aisyah, (2019). Sistem Akuntansi Penggajian Guru, SMA, SMK dan SLB Negeri Se-Kalimantan Selatan. *Tugas Akhir*. Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Anggraini. (2021). Analisis Sistem Akuntnasi Penggajian Pegawai UPT Balai Latihan Kerja Surabaya. *Jurnal Akuntansi*.
- Arikunto. (2006). *Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- COSO. (2015). *Pengendalian Internal*. Dikutip dalam Sujarweni.
- Dwi. (2017). Prosedur Penggajian PNS pada BPS Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Tugas Akhir*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Mulyadi. (2016) *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Maulida. (2018). Sistem Akuntansi Penggajian pada Politeknik Negeri Banjarmasin. *Tugas Akhir*. Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Riska. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas dengan Aplikasi SAS pada BPS Kabupaten Pamekasan.
- Rivai. (2009). *Tujuan Pemberian Gaji*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Wahyuni. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada PT. Segarindo Utama Makassar. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- <https://repository.uma.id> diakses pada 6 April 2022.
- <https://bekasikab.bps.go.id> diakses pada tanggal 17 April 2022.